



**PENGARUH MOTIVASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,  
SANKSI ADMINISTRASI, TINGKAT PENDAPATAN DAN KUALITAS  
PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KUDUS**

**Aida Nurul Husnina<sup>1</sup>, Zaenal Afifi<sup>2</sup>, Ulva Rizky Mulyani<sup>3</sup>**

Universitas Muria Kudus<sup>1,2,3</sup>

[aidanurulhusnina@gmail.com](mailto:aidanurulhusnina@gmail.com)<sup>1</sup>, [zaenal.afifi@umk.ac.id](mailto:zaenal.afifi@umk.ac.id)<sup>2</sup>,

[ulva.rizky@umk.ac.id](mailto:ulva.rizky@umk.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract**

*The purpose of this study is to test and analyze the effect of motivation, utilization of information technology, administrative sanctions, income level and quality of tax services on motor vehicle taxpayer compliance. The primary data used in this study came from questionnaires distributed directly to respondents. The research subjects or population in this study were taxpayers whose motorized vehicles were registered at the Kudus Samsat Office. The sampling technique in this study used the Accidental Sampling technique with a sample size of 415 samples obtained based on the results of the Slovin formula calculation. The research method uses multiple linear regression analysis methods with SPSS version 26 software tools. The results of this study indicate that motivation and utilization of information technology have no effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, administrative sanctions, income levels and the quality of tax services have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

**Keywords:** *motivation, use of information technology, administrative sanctions, income level, quality of tax services and motor vehicle taxpayer compliance.*

**Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada responden. Subjek penelitian atau populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang kendaraan bermotornya didaftarkan di Kantor Samsat Kudus. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Accidental Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 415 sampel yang diperoleh berdasarkan hasil dari perhitungan rumus Slovin. Metode penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat bantu software SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.*

**Kata Kunci:** *motivasi, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi administrasi, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang oleh seseorang atau organisasi berdasarkan persyaratan hukum yang memaksa, yang dipergunakan untuk memenuhi keperluan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki peranan yang penting dalam penerimaan suatu Negara, terutama di dalam pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sumber pendapatan Negara yang utama bersumber dari penerimaan pajak yang telah menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan Negara (Susanto & Arfamaini, 2021). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki kemampuan untuk menggunakan hak-hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Anggita et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu hal yang penting karena akan berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Jumlah penerimaan Negara akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Salah satu pajak yang berperan penting dalam pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum (Susanto & Arfamaini, 2021).

**Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kudus (Dalam Jiwa)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
2018	861.430
2019	871.311
2020	849.184
2021	852.443
2022	856.472

*Sumber: BPS Kabupaten Kudus (2023)*

Berdasarkan tabel tersebut, meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Kudus tentunya akan mempengaruhi tingkat keterbutuhan akan transportasi di Kabupaten Kudus. Jumlah transportasi di Kabupaten Kudus akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Akan tetapi, menurut informasi atau data yang diperoleh dari kantor SAMSAT Kabupaten Kudus, dalam setiap tahunnya ternyata ada penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terjadi karena masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 2 Jumlah Tunggakan PKB di Kabupaten Kudus**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Tunggakan PKB</b>
2018	Rp 3.456.994.500
2019	Rp 6.230.126.000
2020	Rp 11.446.072.000
2021	Rp 9.367.994.000
2022	Rp 6.509.112.000

*Sumber: Kantor SAMSAT Kudus (2023)*



Besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Kudus timbul dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini timbul karena adanya masalah seperti kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya masih rendah, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai bagaimana cara penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi perpajakan yang ada, dan masih banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang belum rutin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya dikarenakan adanya kesulitan dalam faktor ekonomi (Hidayat & Maulana, 2022). Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan upaya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka diperlukan adanya faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang datang dari dalam atau dari luar diri seseorang untuk melakukan suatu hal demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi jika dikaitkan dengan pajak adalah keinginan wajib pajak sendiri atau dorongan orang lain untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Prastyatini & Nabela, 2023). Penelitian tentang motivasi yang dilakukan oleh Andrean et al (2023) dan Mawarni & Refnida (2018) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu proses menyusun, mengolah dan melakukan penyimpanan data untuk memberikan hasil yang lebih akurat, relevan dan secara tepat waktu. Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi berkembang dengan pesat. Teknologi yang berkembang dengan pesat ini dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya. Sehingga diharapkan penerimaan negara akan bertambah dari pemungutan pajak tersebut (Anshori, 2020). Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh Samuel & Susanti (2023) dan Anshori (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi administrasi adalah salah satu instrumen yang memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan pajak. Pemberian sanksi administrasi ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam pembayaran pajaknya, sehingga dengan demikian harapannya sanksi administrasi dapat menambah tingkat kepatuhan seorang wajib pajak yang kemudian akan berpengaruh kepada naiknya pendapatan Negara (Palit et al., 2020). Penelitian mengenai sanksi administrasi yang dilakukan oleh Nurdin *et al* (2022) dan Mahdani & Ismatullah (2021) menyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor



**Journal Accounting International Mount Hope**  
**JAIMO**  
**E-ISSN = 3031-1276**

Tingkat Pendapatan merupakan sejumlah uang atau kekayaan yang didapatkan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang diakumulasikan untuk menutupi biaya hidup seseorang (Eva et al., 2023). Tingkat pendapatan adalah standar hidup yang dapat dinikmati oleh seseorang atau keluarga berdasarkan penghasilan atau sumber pendapatan lainnya. Perbedaan tingkat pendapatan inilah yang nantinya akan mempengaruhi wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Penelitian mengenai tingkat pendapatan yang dilakukan oleh Fatmawati & Adi (2022) dan Barlan *et al* (2021) menyatakan bahwa tingkat pendapatan memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kualitas pelayanan pajak adalah proses membantu wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan empati dan hubungan interpersonal untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan. Pelayanan yang baik dari para petugas pajak akan memberikan kenyamanan kepada pihak wajib pajak, sehingga akan berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak (Juliantari et al., 2021). Penelitian mengenai kualitas pelayanan pajak yang dilakukan oleh Samuel & Susanti (2023) dan Indrayani & Sujana (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kudus. Sementara manfaat penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi bagi pembaca, menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya serta dapat menjadi tambahan literatur bagi Samsat Kudus mengenai pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik untuk pengumpulan dan analisis datanya. Penelitian ini berlokasi di Kabupten Kudus. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 579.435 wajib pajak kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Kantor Samsat Kudus. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 415 responden dengan Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Accidental Sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner penelitian sebagai sumber datanya. Sedangkan pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* 1-5 poin. Penelitian ini menggunakan bantuan *software* SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 26 untuk pengolahan data. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**HASIL**

**Analisis Statistik Deskriptif**

**Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Motivasi (X1)	415	6,00	15,00	12,8169	1,54645
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	415	11,00	25,00	19,8795	2,73816
Sanksi Administrasi (X3)	415	10,00	20,00	17,7831	1,61999
Tingkat Pendapatan (X4)	415	9,00	20,00	16,9663	2,39339
Kualitas Pelayanan Pajak (X5)	415	20,00	40,00	33,2434	3,04333
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	415	18,00	30,00	26,9807	2,24891
Valid N ( <i>listwise</i> )	415				

Sumber: data primer yang diolah (2024)

Hasil pada tabel 3 menunjukkan nilai Standar deviasi dari masing-masing variabel yang lebih besar dari nilai rata – rata. Hal ini berarti jawaban responden yang satu dengan responden yang lain tentang masing-masing variabel tidak jauh berbeda.

**Uji Kualitas Data**

**Uji Validitas**

**Tabel 4 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Motivasi (X1)	X1.1	0,654	0,096	Valid
	X1.2	0,814	0,096	Valid
	X1.3	0,831	0,096	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	X2.1	0,756	0,096	Valid
	X2.2	0,705	0,096	Valid
	X2.3	0,664	0,096	Valid
	X2.4	0,811	0,096	Valid
	X2.5	0,563	0,096	Valid
Sanksi Administrasi (X3)	X3.1	0,664	0,096	Valid
	X3.2	0,624	0,096	Valid
	X3.3	0,745	0,096	Valid
	X3.4	0,732	0,096	Valid
Tingkat Pendapatan (X4)	X4.1	0,867	0,096	Valid
	X4.2	0,868	0,096	Valid
	X4.3	0,694	0,096	Valid
	X4.4	0,672	0,096	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X5)	X5.1	0,625	0,096	Valid

	X5.2	0,549	0,096	Valid
	X5.3	0,656	0,096	Valid
	X5.4	0,691	0,096	Valid
	X5.5	0,656	0,096	Valid
	X5.6	0,638	0,096	Valid
	X5.7	0,704	0,096	Valid
	X5.8	0,513	0,096	Valid
	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y1.1	0,695	0,096
Y1.2		0,657	0,096	Valid
Y1.3		0,711	0,096	Valid
Y1.4		0,642	0,096	Valid
Y1.5		0,681	0,096	Valid
Y1.6		0,667	0,096	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid karena seluruh butir pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel atau  $r$  hitung  $>$  0,09.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Pernyataan	Cronbach Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Motivasi (X1)	3	0,653	0,06	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	5	0,744	0,06	Reliabel
Sanksi Administrasi (X3)	4	0,610	0,06	Reliabel
Tingkat Pendapatan (X4)	4	0,779	0,06	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X5)	8	0,784	0,06	Reliabel
Kepatuhan WPKB (Y)	6	0,761	0,06	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner adalah reliabel karena seluruh variabel dalam penelitian memiliki nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0,60.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

**Tabel 6 Hasil Uji Normalitas**

	<i>Unstandardized Residual</i>	Keterangan
<i>Asymp. Sig. (2 Tailed)</i>	0,200	Normal

Sumber: data primer yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, datanya telah berdistribusi secara normal karena hasil uji normalitasnya diperoleh nilai *asyp.sig. (2 tailed)*  $>$  nilai signifikansi yaitu  $0,200 >$  0,05.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Motivasi (X1)	0,0886	1,129	Bebas Multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,897	1,115	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Administrasi (X3)	0,915	1,093	Bebas Multikolinearitas
Tingkat Pendapatan (X4)	0,881	1,135	Bebas Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan Pajak (X5)	0,930	1,075	Bebas Multikolinearitas

Sumber: data primer yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance  $> 0,01$  dan nilai VIF  $< 10$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dinyatakan bebas multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
Motivasi (X1)	0,499	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,397	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Administrasi (X3)	0,083	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tingkat Pendapatan (X4)	0,157	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan Pajak (X5)	0,128	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: data primer yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi  $> 0,05$ . Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>
	<b>B</b>
(Constant)	14,763
Motivasi (X1)	0,085
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,030
Sanksi Administrasi (X3)	0,273
Tingkat Pendapatan (X4)	0,127
Kualitas Pelayanan Pajak (X5)	0,106

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel dapat diketahui hasil persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$KWPKB = 14,763 + 0,085X1 + 0,030X2 + 0,273X3 + 0,127X4 + 0,106X5 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat dijelaskan bahwa konstanta yang bernilai positif sebesar 14,763 menyatakan bahwa apabila variabel independen yang meliputi motivasi, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan pajak dianggap konstan (0), maka nilai dari variabel dependennya (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) akan senilai 14,763.

**Uji Hipotesis**

**Uji t**

**Tabel 10 Hasil Uji t**

Model	<b>B</b>	<b>t hitung</b>	<b>t tabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
Motivasi (X1)	0,085	1,193	1,965	0,233	Ditolak
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,030	0,748	1,965	0,455	Ditolak
Sanksi Administrasi (X3)	0,273	4,065	1,965	0,000	Diterima
Tingkat Pendapatan (X4)	0,127	2,745	1,965	0,006	Diterima
Kualitas Pelayanan Pajak (X5)	0,106	2,999	1,965	0,003	Diterima

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui variabel motivasi dan pemanfaatan teknologi informasi memperoleh nilai t hitung < t tabel dan nilai signifikansi > 0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi dan variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan pajak memperoleh nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	Adjusted R Square
1	0,116

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 0,116. Ini menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi motivasi, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan pajak mempengaruhi variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor hanya sebesar 11,6% sementara sisanya sebesar 88,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

### PEMBAHASAN

#### **Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan variabel motivasi dalam penelitian ini memperoleh nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $1,193 < 1,965$ ) dengan nilai signifikansinya  $> 0,05$  ( $0,233 > 0,05$ ) sehingga kesimpulannya adalah variabel motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrean *et al* (2023) dan Mawarni & Refnida (2018). Hal ini karena wajib pajak percaya bahwa setiap warga negara harus membayar pajak, tidak peduli mereka setuju atau tidak. Sehingga tidak ada motivasi yang timbul baik dari dalam diri wajib pajak tersebut atau dari luar yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

#### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini memperoleh nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $0,748 < 1,965$ ) dengan nilai signifikansinya  $> 0,05$  ( $0,455 > 0,05$ ) sehingga kesimpulannya adalah variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samuel & Susanti (2023) dan Anshori (2020). Hal ini dikarenakan masih cukup banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang adanya teknologi informasi perpajakan dan juga masih kurangnya sosialisasi yang diberikan terkait penggunaan teknologi informasi perpajakan tersebut. Sehingga para wajib pajak masih menganggap bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan teknologi informasi perpajakan adalah hal yang cukup sulit dan membingungkan untuk dilakukan, oleh karena itu wajib pajak pun tidak memiliki minat yang tinggi untuk memanfaatkan ataupun menggunakan teknologi informasi perpajakan yang ada.

### **Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, variabel sanksi administrasi dalam penelitian ini memperoleh nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $4,065 > 1,965$ ) dengan nilai signifikansinya  $<$   $0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga kesimpulannya adalah variabel sanksi administrasi memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin *et al* (2022) dan Mahdani & Ismatullah (2021). Besar kecilnya sanksi administrasi yang diberikan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin besar sanksi administrasi yang diberikan tentunya akan memberatkan wajib pajak dan membuat wajib pajak menjadi lebih taat terhadap peraturan yang ada sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, variabel tingkat pendapatan dalam penelitian ini memperoleh nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $2,745 > 1,965$ ) dengan nilai signifikansinya  $<$   $0,05$  ( $0,006 < 0,05$ ) sehingga kesimpulannya adalah variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati & Adi (2022) dan Barlan *et al* (2021). Mengingat bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor sifatnya adalah memaksa dan merupakan pungutan wajib sehingga wajib pajak dengan pendapatan yang rendah pun akan tetap taat dan patuh membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, variabel kualitas pelayanan pajak dalam penelitian ini memperoleh nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $2,999 > 1,965$ ) dengan nilai signifikansinya  $<$   $0,05$  ( $0,003 < 0,05$ ) sehingga kesimpulannya adalah variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Samuel & Susanti (2023) dan Indrayani & Sujana (2021). Hal ini dikarenakan baik atau buruknya kualitas pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepuasan wajib pajak tentunya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepuasan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya juga akan tinggi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel motivasi dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrean, R., Firmansyah, & Indriasari, D. (2023). Pengaruh Motivasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 2169–2177.
- Anggita, P., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 1–16. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Anshori, Z. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Media Mahardhika*, 19(1), 130–142. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v19i1.204>
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Eva, M. V., Arizona, I. P. E., & Dicriyani, N. L. G. M. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1), 188–198.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *E-QIEN: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–890.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 05(1), 11–35.
- Indrayani, N. W., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Kabupaten Bangli. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12(1), 852–864.

- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *JURNAL KHARISMA*, 3(1), 128–139.
- Mahdani, T. M., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(1), 16–25. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14751>
- Mawarni, F. K., & Refnida, M. E. (2018). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Persepsi Mahasiswa Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi. *Journal EduSosial*, 1–6.
- Nurdin, E., Tamburaka, S., & Fadila, S. N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24522>
- Palit, R. N., Sumual, T. E. M., & Manengkey, J. (2020). Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kantor Samsat Tomohon. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 1(3), 22–28. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Prastyatini, S. L. Y., & Nabela, Y. A. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak (JAP)*, 23(02), 1–16.
- Samuel, H., & Susanti, M. (2023). Determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor determinants of motor vehicle taxpayer compliance 1,2). *JURNAL SAINTIFIK (Multi Science Journal)*, 21(1), 37–46.
- Sarlina, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Fairvalue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 183–198.
- Susanto, A. K., & Arfamaini, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, 5(1), 12–33. <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>